

PRABU SILIWANGI DAN AWAL ISLAMISASI DI TANAH SUNDA ANTARA MITOLOGI DAN SEJARAH POLITIK

Yan Nurcahya¹

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

yan.itb2021@gmail.com

Deri Sugiarto²

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

derisugiarto596@gmail.com

Abstract: Prabu Siliwangi occupies a significant position in the history and collective memory of the Sundanese people. However, the abundance of mythological narratives surrounding this figure has often blurred the distinction between historical facts and oral traditions, particularly in the context of the Islamization of the Sundanese region. This study aims to analyze Prabu Siliwangi from historical and political perspectives to explain the relationship between mythology, political transformation, and the process of Islamization in the Land of Sunda. The research employs the historical method, consisting of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The data were collected from inscriptions, ancient manuscripts, chronicles (*babad*), and relevant scholarly literature. The findings indicate that the identification of Prabu Siliwangi with Sri Baduga Maharaja has a strong historical foundation, whereas narratives concerning his rejection of Islam primarily reflect collective memory constructed through oral traditions rather than verifiable historical facts. Furthermore, the Islamization of the Sundanese region occurred gradually through trade networks, Islamic missionary activities, diplomacy, and political transformation, resulting in a process of cultural acculturation between Sundanese traditions and Islam. This study concludes that Prabu Siliwangi represents a cultural symbol that embodies the continuity between the legacy of the Pajajaran Kingdom and the emergence of Islamic civilization in the Sundanese region. These findings contribute to the historiography of Islam in the Indonesian Archipelago by positioning mythology as an integral component of cultural memory that should be critically examined through historical inquiry.

Keywords: *Prabu Siliwangi, Islamization, Pajajaran Kingdom, Historiography, Collective Memory.*

Abstrak: Prabu Siliwangi merupakan figur yang menempati posisi penting dalam sejarah dan memori kolektif masyarakat Sunda. Namun, keberadaan berbagai narasi mitologis mengenai dirinya sering kali menimbulkan percampuran antara fakta sejarah dan tradisi lisan, terutama dalam konteks proses Islamisasi di Tanah Sunda. Penelitian ini bertujuan menganalisis figur Prabu Siliwangi melalui perspektif historis dan politik untuk menjelaskan hubungan antara mitologi, transformasi kekuasaan, dan Islamisasi di wilayah Sunda. Penelitian menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber data berasal dari prasasti, naskah kuno, babad, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi Prabu Siliwangi dengan Sri Baduga Maharaja memiliki dasar historis yang kuat, sedangkan narasi mengenai penolakan terhadap Islam lebih mencerminkan konstruksi memori kolektif yang berkembang dalam tradisi lisan. Proses Islamisasi di Tanah Sunda berlangsung secara bertahap melalui perdagangan, dakwah, diplomasi, dan perubahan politik sehingga membentuk pola akulturasi antara tradisi Sunda dan Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa Prabu Siliwangi merupakan simbol identitas budaya yang merepresentasikan kesinambungan antara warisan Pajajaran dan berkembangnya peradaban Islam di Tanah Sunda. Temuan ini memperkaya kajian historiografi Islam Nusantara dengan menempatkan mitologi sebagai bagian dari memori budaya yang perlu dikaji secara kritis melalui pendekatan sejarah.

Kata kunci: *Prabu Siliwangi, Islamisasi, Pajajaran, Historiografi, Memori Kolektif.*

PENDAHULUAN

Islamisasi di Nusantara merupakan proses historis yang berlangsung secara bertahap melalui interaksi perdagangan, jaringan ulama, perkawinan, diplomasi politik, serta adaptasi budaya lokal. Para sejarawan sepakat bahwa penyebaran Islam di Indonesia tidak berlangsung melalui satu pola tunggal, melainkan melalui proses yang berbeda-beda sesuai karakter sosial dan politik setiap wilayah. Anthony Reid menjelaskan bahwa perkembangan jaringan perdagangan Samudra Hindia sejak abad ke-13 mendorong lahirnya komunitas-komunitas Muslim di berbagai pelabuhan Nusantara yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam ke wilayah pedalaman¹. Senada dengan itu, M.C. Ricklefs menegaskan bahwa proses Islamisasi di Jawa berlangsung secara bertahap melalui kombinasi hubungan ekonomi, kekuasaan politik, dan transformasi budaya masyarakat².

¹ Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680, Vol. II: Expansion and Crisis* (New Haven: Yale University Press, 1993).

² M. C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c.1200, 4th Ed.* (Stanford: Stanford University Press, 2008).

Tanah Sunda merupakan salah satu wilayah yang memiliki dinamika Islamisasi yang berbeda dibandingkan kawasan pesisir utara Jawa lainnya. Sebelum berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda dan kemudian Kerajaan Pajajaran yang bercorak Hindu-Buddha. Keberadaan kerajaan tersebut terekam dalam berbagai sumber primer, antara lain *Carita Parahyangan*, *Bujangga Manik*, serta naskah-naskah Sunda Kuna yang menunjukkan kuatnya sistem pemerintahan berbasis tradisi Hindu-Siwa dan Budha³. Walaupun demikian, sejak abad ke-15 hingga ke-16 M, jaringan perdagangan internasional yang berkembang di pelabuhan Cirebon, Banten, dan pesisir utara Jawa Barat membuka ruang bagi masuknya pengaruh Islam yang dibawa para saudagar, ulama, serta elite politik lokal⁴.

Dalam historiografi Sunda, nama Prabu Siliwangi menempati posisi yang sangat penting sebagai simbol kejayaan Kerajaan Pajajaran sekaligus penanda berakhirnya dominasi politik Hindu-Buddha di Tatar Sunda. Akan tetapi, sebagian besar sejarawan berpendapat bahwa "Prabu Siliwangi" bukan merupakan nama personal, melainkan gelar kehormatan yang dilekatkan kepada raja-raja tertentu, terutama Sri Baduga Maharaja (1482–1521)⁵.

Identifikasi tersebut didasarkan pada analisis filologis terhadap *Carita Parahyangan*, *Sanghyang Siksakandang Karesian*, serta Prasasti Batutulis yang menyebut Sri Baduga sebagai penguasa besar Pajajaran⁶. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai Prabu Siliwangi perlu ditempatkan secara kritis antara fakta sejarah, tradisi lisan, dan konstruksi memori kolektif masyarakat Sunda.

Perkembangan Islam di wilayah Sunda berlangsung bersamaan dengan munculnya pusat-pusat kekuasaan Islam baru, terutama Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Kedua kerajaan tersebut tidak hanya memperluas pengaruh politiknya, tetapi juga membangun jaringan dakwah melalui hubungan perdagangan,

³ Saleh Danasasmita dan Atja, *Carita Parahyangan* (Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, 1981), 22-35.

⁴ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII–XVIII* (Jakarta: Kencana, 2013), 23-42.

⁵ Edi S. Ekadjati, *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2014), 94-110.

⁶ Atja dan Saleh Danasasmita, *Sanghyang Siksakandang Karesian* (Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, 1981).

pendidikan, dan perkawinan elite. Dalam konteks ini, figur Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) memiliki peranan penting dalam proses integrasi Islam ke dalam struktur sosial masyarakat Sunda tanpa menghilangkan seluruh unsur budaya lokal⁷.

Islamisasi di Jawa Barat lebih banyak menunjukkan pola akulturasi dibandingkan konfrontasi, sehingga berbagai tradisi lokal tetap bertahan dalam bentuk-bentuk baru yang telah mengalami proses islamisasi budaya. Di sisi lain, figur Prabu Siliwangi berkembang sangat kuat dalam tradisi lisan masyarakat Sunda. Berbagai kisah mengenai moksa di Hutan Sancang, harimau putih, maupun keberlanjutan kekuasaan spiritual Siliwangi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai fakta sejarah, melainkan sebagai bentuk *collective memory* yang berfungsi menjaga identitas budaya masyarakat Sunda setelah berubahnya konfigurasi politik regional. Jan Vansina menjelaskan bahwa tradisi lisan merupakan sumber sejarah yang merepresentasikan cara suatu masyarakat membangun ingatan kolektif terhadap masa lalunya, meskipun tidak seluruhnya dapat diverifikasi secara faktual⁸. Oleh karena itu, mitologi Prabu Siliwangi memiliki nilai penting sebagai objek kajian historiografi, antropologi, maupun sejarah politik.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara Prabu Siliwangi, Kerajaan Pajajaran, dan Islamisasi di Tanah Sunda. Edi S. Ekadjati mengkaji identitas historis Sri Baduga Maharaja melalui pendekatan filologi dan historiografi Sunda⁹. Kemudian Lubis membahas perkembangan politik Kerajaan Sunda hingga masa keruntuhannya berdasarkan sumber-sumber lokal dan Portugis¹⁰. Sementara itu penelitian Atja menitikberatkan pada kritik naskah Sunda Kuna sebagai sumber sejarah Kerajaan Pajajaran¹¹. Sedangkan Ading Kusdiana mengulas proses Islamisasi Jawa Barat melalui pendekatan sejarah sosial-keagamaan¹². Selanjutnya, Azyumardi Azra menjelaskan terbentuknya jaringan ulama Nusantara yang menjadi

⁷ Ading Kusdiana, *Sejarah dan Kebudayaan Islam Periode Pertengahan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 167-181.

⁸ Jan Vansina, *Oral Tradition as History* (Madison: University of Wisconsin Press, 1985).

⁹ S. Ekadjati, *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah*.

¹⁰ Nina Herlina Lubis, *Sejarah Tatar Sunda, Jilid I* (Bandung: Satya Historika, 2011), 175–214.

¹¹ Danasasmita, *Carita Parahyangan*.

¹² Kusdiana, *Sejarah dan Kebudayaan Islam Periode Pertengahan*.

salah satu faktor penting penyebaran Islam di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jawa Barat¹³.

Kajian-kajian tersebut pada umumnya masih berdiri secara parsial. Penelitian mengenai Prabu Siliwangi lebih banyak berfokus pada aspek filologi, legitimasi politik kerajaan, atau kajian folklor. Sedangkan penelitian tentang Islamisasi Sunda lebih banyak menyoroti perkembangan jaringan dakwah, kerajaan Islam, maupun sejarah penyebaran Islam. Masih relatif sedikit penelitian yang mengintegrasikan mitologi Prabu Siliwangi sebagai representasi memori politik masyarakat Sunda dalam menjelaskan dinamika Islamisasi dan transformasi kekuasaan pada akhir masa Kerajaan Pajajaran.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa belum adanya analisis yang secara komprehensif menghubungkan konstruksi mitologi Prabu Siliwangi dengan proses perubahan sosial, politik, dan keagamaan masyarakat Sunda menggunakan pendekatan historiografi kritis. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis integratif antara historiografi, memori kolektif, dan proses Islamisasi di Tanah Sunda. Prabu Siliwangi tidak diposisikan sebagai tokoh historis semata ataupun sebagai legenda semata, melainkan dipahami sebagai simbol politik dan budaya yang merepresentasikan proses transformasi kekuasaan dari kerajaan Hindu-Buddha menuju masyarakat Islam di Tatar Sunda. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara mitos, sejarah, dan identitas budaya masyarakat Sunda.

Penelitian ini memiliki signifikansi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian historiografi Islam Indonesia, khususnya mengenai hubungan antara memori kolektif, mitologi politik, dan proses Islamisasi. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan akademik dalam pengembangan sejarah lokal Sunda, pendidikan sejarah, pelestarian warisan budaya, serta penguatan literasi masyarakat mengenai proses Islamisasi yang berlangsung secara damai, adaptif, dan kontekstual.

¹³ Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII–XVIII*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis untuk mengkaji hubungan antara mitologi Prabu Siliwangi dan proses Islamisasi di Tanah Sunda. Metode historis dipilih karena memungkinkan peneliti merekonstruksi peristiwa masa lampau secara sistematis melalui penelusuran, verifikasi, interpretasi, dan penulisan fakta sejarah berdasarkan sumber-sumber yang tersedia¹⁴.

Penelitian dilaksanakan melalui empat tahapan metode historis, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi¹⁵. Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan Prabu Siliwangi, Kerajaan Sunda-Pajajaran, dan proses Islamisasi di Jawa Barat. Sumber yang digunakan meliputi naskah *Carita Parahyangan*, *Babad Pajajaran*, *Serat Kanda*, prasasti, serta buku dan artikel ilmiah yang relevan.

Tahap kritik sumber dilakukan untuk menilai autentisitas dan kredibilitas sumber, baik melalui kritik eksternal maupun kritik internal. Selanjutnya, tahap interpretasi digunakan untuk menafsirkan fakta-fakta sejarah dengan membandingkan data dari berbagai sumber guna memahami posisi mitologi Prabu Siliwangi dalam dinamika Islamisasi di Tanah Sunda. Tahap terakhir, historiografi, dilakukan dengan menyusun hasil penelitian secara sistematis dalam bentuk narasi sejarah yang didasarkan pada hasil analisis sumber¹⁶.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) melalui penelaahan terhadap naskah, buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan berbagai sumber sejarah untuk mengidentifikasi keterkaitan antara unsur mitologis dan fakta historis. Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber melalui perbandingan antara naskah tradisional, kajian akademik, dan temuan sejarah yang relevan¹⁷.

¹⁴ Louis Gottschalk, *Understanding History: A Primer of Historical Method* (New York: Alfred A. Knopf, 1969), 48-52.

¹⁵ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Tiara Wacana: Yogyakarta, 2013), 69-80.

¹⁶ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), 103-126.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), 186-193.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Prabu Siliwangi Dalam Perspektif Sejarah Dan Memori Kolektif Sunda

Hasil penelitian menunjukkan bahwa figur Prabu Siliwangi menempati posisi sentral dalam konstruksi identitas masyarakat Sunda. Berdasarkan telaah terhadap sumber primer berupa *Carita Parahyangan*, *Sanghyang Siksakandang Karesian*, Prasasti Batutulis, serta sejumlah babad lokal, istilah "Prabu Siliwangi" tidak merujuk pada satu tokoh historis secara eksplisit, melainkan merupakan gelar yang kemudian dilekatkan oleh tradisi kepada Sri Baduga Maharaja (1482–1521), raja besar Kerajaan Sunda-Pajajaran. Dalam perkembangan historiografi Sunda, identifikasi tersebut semakin menguat karena Sri Baduga dipandang sebagai penguasa yang membawa stabilitas politik, kemakmuran ekonomi, dan legitimasi religius bagi kerajaan Pajajaran¹⁸.

Walaupun demikian, hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan antara data historis dan konstruksi tradisi lisan. Prasasti Batutulis hanya mencatat keberhasilan Sri Baduga dalam pembangunan infrastruktur, penataan pemerintahan, serta penghormatan terhadap leluhurnya tanpa menyebutkan kisah penolakan terhadap Islam maupun transformasi menjadi harimau. Sebaliknya, tradisi lisan dan babad yang disusun pada periode lebih akhir menghadirkan narasi-narasi simbolik yang memperlihatkan Prabu Siliwangi sebagai tokoh sakral yang memiliki kemampuan supranatural. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa mitologi Siliwangi merupakan hasil konstruksi memori kolektif masyarakat Sunda yang berkembang setelah runtuhnya Kerajaan Pajajaran¹⁹.

Dalam perspektif historiografi modern, memori kolektif semacam ini tidak dipahami sebagai fakta sejarah, melainkan sebagai representasi identitas budaya yang berfungsi mempertahankan kontinuitas sejarah suatu komunitas. Oleh karena itu, figur Prabu Siliwangi lebih tepat dipahami sebagai simbol politik dan budaya daripada sekadar tokoh historis individual²⁰.

¹⁸ Danasasmita, *Carita Parahyangan*, 109–118.

¹⁹ S. Ekadjati, *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah*, 95–103.

²⁰ Vansina, *Oral Tradition as History*, 18–31.

Islamisasi Tanah Sunda Dan Transformasi Kekuasaan Pajajaran

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa proses Islamisasi di Tanah Sunda berlangsung secara bertahap melalui interaksi perdagangan, jaringan ulama, diplomasi politik, dan perkawinan antarelite. Tidak ditemukan bukti sejarah yang menunjukkan adanya penaklukan militer secara langsung terhadap Kerajaan Pajajaran pada fase awal penyebaran Islam. Sebaliknya, sumber-sumber Portugis abad ke-16 justru menggambarkan hubungan diplomatik antara Pajajaran dengan bangsa Eropa yang bertujuan mempertahankan keseimbangan politik menghadapi berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di pesisir utara Jawa²¹.

Perkembangan Kesultanan Cirebon dan Banten secara bertahap mengubah konfigurasi politik di wilayah barat Pulau Jawa. Kedua kesultanan tersebut membangun legitimasi kekuasaan melalui integrasi otoritas politik dengan kepemimpinan keagamaan Islam. Model legitimasi tersebut berbeda dengan konsep *dewaraja* yang berkembang pada tradisi Hindu-Buddha di Pajajaran. Pergeseran paradigma inilah yang kemudian melahirkan perubahan mendasar dalam struktur politik masyarakat Sunda pada abad ke-16²².

Dalam konteks tersebut, narasi mengenai penolakan Prabu Siliwangi terhadap Islam tidak dapat dipahami secara literal sebagai fakta sejarah, melainkan sebagai representasi simbolik atas resistensi elite Hindu terhadap perubahan struktur kekuasaan. Dengan demikian, konflik yang tergambar dalam berbagai babad lebih mencerminkan dinamika politik dibandingkan pertentangan teologis semata.

Prasasti Kebantenan sebagai Bukti Kebijakan Politik Sri Baduga Maharaja

Temuan penting penelitian ini berasal dari analisis terhadap Prasasti Kebantenan yang memperlihatkan karakter pemerintahan Sri Baduga Maharaja. Isi prasasti menunjukkan adanya kebijakan pembebasan beberapa jenis pajak terhadap masyarakat Jayagiri dan Sunda Sembawa, seperti *dasa*, *calagra*, *kapas timbang*, dan *pare dondang*. Kebijakan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintahan Pajajaran

²¹ João de Barros, *Da Asia De João De Barros: Dos Feitos, Que Os Portuguezes Fizeram No Descubrimeto, E Conquista Dos Mares, E Terras Do Oriente. Decada Quarta. Parte Primeira*, 4th ed. (Lisboa: Na Regia Officina Typografica, 1777). Lihat juga Claude Guillot, *Banten: Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII* (Jakarta: KPG, 2008), 45–60.

²² Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c.1200*, 4th Ed, 30–36.

telah menerapkan sistem administrasi fiskal yang terorganisasi sekaligus memberikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat tertentu yang memiliki fungsi strategis bagi kerajaan²³.

Selain itu, prasasti juga memuat perintah agar petugas pelabuhan tidak memungut bea terhadap kelompok masyarakat yang mengabdikan diri pada kegiatan keagamaan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan Sri Baduga tidak hanya dibangun melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui perlindungan terhadap institusi religius dan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pemerintahan Pajajaran memiliki sistem birokrasi yang relatif maju sebelum masuknya pengaruh Islam secara dominan di wilayah Sunda²⁴.

Data epigrafis tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa citra Sri Baduga sebagai pemimpin yang adil tidak semata-mata berasal dari mitologi, tetapi juga memperoleh legitimasi melalui sumber sejarah primer berupa prasasti.

Mitologi Prabu Siliwangi sebagai Representasi Identitas Politik Sunda

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkembangnya mitologi Prabu Siliwangi setelah keruntuhan Pajajaran memiliki fungsi sosial-politik yang penting. Tradisi mengenai "Prabu Siliwangi yang moksa" atau "berubah menjadi harimau" tidak ditemukan dalam sumber primer sezaman, tetapi berkembang luas dalam naskah-naskah babad serta tradisi lisan masyarakat Sunda pada periode berikutnya²⁵.

Dalam kajian antropologi sejarah, kemunculan mitos tersebut dapat dipahami sebagai mekanisme masyarakat dalam mempertahankan identitas budaya ketika menghadapi perubahan politik dan agama. Mitos mengenai "raja yang akan kembali" merupakan simbol harapan terhadap hadirnya kembali pemerintahan yang adil sekaligus menjadi bentuk legitimasi historis masyarakat Sunda atas kejayaan Pajajaran.

²³ Atja dan Saleh Danasasmita, *Amanat Dari Galunggung* (Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, 1981), 52–58.

²⁴ Hasan Djafar, *Prasasti Kebantenan dan Administrasi Kerajaan Sunda*, 2, no. 1 (2013), 19–34.

²⁵ Edi S. Ekadjati, *Masyarakat Sunda dan Kebudayaannya* (Jakarta: Girimukti Pasaka, 2009), 121–134.

Fenomena ini menunjukkan bahwa Islamisasi di Tanah Sunda berlangsung melalui proses negosiasi budaya. Islam diterima sebagai sistem keagamaan baru tanpa menghapus seluruh simbol budaya lama. Sebaliknya, simbol-simbol Pajajaran tetap dipertahankan sebagai identitas etnis, sementara nilai-nilai Islam diintegrasikan ke dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, Islamisasi tidak menghasilkan pemutusan sejarah, melainkan menciptakan kesinambungan budaya yang khas di wilayah Sunda²⁶.

Analisis Politik Islamisasi Tanah Sunda

Dari perspektif politik, penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi dari Pajajaran menuju Kesultanan Cirebon dan Banten merupakan perubahan paradigma legitimasi kekuasaan. Jika kerajaan Hindu memperoleh legitimasi melalui konsep kosmologi raja sebagai representasi kekuatan ilahi, maka kerajaan Islam membangun legitimasi melalui hubungan antara kekuasaan politik dan otoritas keagamaan.

Dalam konteks tersebut, figur Prabu Siliwangi mengalami transformasi makna. Ia tidak lagi sekadar diposisikan sebagai raja terakhir Pajajaran, melainkan menjadi simbol moralitas politik masyarakat Sunda. Nilai-nilai kepemimpinan, keadilan, dan perlindungan terhadap rakyat yang melekat pada figur Sri Baduga tetap diwariskan dalam tradisi politik Islam Sunda. Oleh karena itu, hubungan antara Pajajaran dan Islam tidak dapat dipahami sebagai hubungan yang sepenuhnya bersifat konfrontatif, melainkan sebagai proses adaptasi budaya dan transformasi legitimasi politik²⁷.

Temuan ini memperlihatkan bahwa mitologi Prabu Siliwangi merupakan bagian dari proses pembentukan identitas historis masyarakat Sunda. Mitos tersebut tidak menggantikan fakta sejarah, tetapi melengkapinya sebagai memori budaya yang menjelaskan bagaimana masyarakat memahami perubahan agama, kekuasaan, dan identitas kolektif sepanjang proses Islamisasi di wilayah Jawa Barat.

²⁶ Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII–XVIII*, 24–36.

²⁷ Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya, Jilid II* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 45–68..

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa Prabu Siliwangi merupakan figur yang memadukan dimensi historis dan mitologis dalam memori kolektif masyarakat Sunda. Melalui metode penelitian historis yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, penelitian ini menemukan bahwa Sri Baduga Maharaja memiliki dasar historis yang kuat sebagai tokoh yang kemudian diidentifikasi sebagai Prabu Siliwangi, sedangkan narasi mengenai penolakan terhadap Islam lebih merupakan konstruksi tradisi lisan dan babad daripada fakta sejarah yang dapat diverifikasi. Proses Islamisasi di Tanah Sunda berlangsung secara bertahap melalui perdagangan, dakwah, diplomasi, dan transformasi politik, sehingga mencerminkan proses akulturasi budaya, bukan semata-mata konflik atau penaklukan.

Penelitian ini berkontribusi dalam memperjelas hubungan antara sejarah, mitologi, dan proses Islamisasi di Tanah Sunda melalui pendekatan sejarah kritis. Namun, kajian ini masih terbatas pada analisis sumber tertulis dan belum didukung secara optimal oleh data arkeologis maupun penelitian lapangan mengenai tradisi lisan masyarakat Sunda. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan pendekatan interdisipliner agar rekonstruksi sejarah Prabu Siliwangi dan Islamisasi di Tanah Sunda menjadi lebih komprehensif dan objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011.
- Atja, dan Saleh Danasasmita. *Amanat Dari Galunggung*. Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, 1981.
- . *Sanghyang Siksakandang Karesian*. Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, 1981.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII–XVIII*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Barros, João de. *Da Asia De João De Barros: Dos Feitos, Que Os Portuguezes Fizeram No Descubrimento, E Conquista Dos Mares, E Terras Do Oriente. Decada Quarta. Parte Primeira*. 4th ed. Lisboa: Na Regia Officina Typografica, 1777.

- Danasasmita, Saleh, dan Atja. *Carita Parahyangan*. Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, 1981.
- Djafar, Hasan. *Prasasti Kebantenan dan Administrasi Kerajaan Sunda*,. 2, no. 1 (2013).
- Gottschalk, Louis. *Understanding History: A Primer of Historical Method*. New York: Alfred A. Knopf, 1969.
- Guillot, Claude. *Banten: Sejarah Dan Peradaban Abad X–XVII*. Jakarta: KPG, 2008.
- Herlina Lubis, Nina. *Sejarah Tatar Sunda, Jilid I*. Bandung: Satya Historika, 2011.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana: Yogyakarta, 2013.
- Kusdiana, Ading. *Sejarah dan Kebudayaan Islam Periode Pertengahan*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Lombard, Denys. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Jilid II*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Reid, Anthony. *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680, Vol. II: Expansion and Crisis*. New Haven: Yale University Press, 1993.
- Ricklefs, M. C. *A History of Modern Indonesia Since c.1200, 4th Ed*. Stanford: Stanford University Press, 2008.
- S. Ekadjati, Edi. *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2014.
- . *Masyarakat Sunda dan Kebudayaanannya*. Jakarta: Girimukti Pasaka, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Vansina, Jan. *Oral Tradition as History*. Madison: University of Wisconsin Press, 1985.